

KONSTRUKSI POLITIK IDENTITAS MELALUI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dian Herdiana

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Cimahi
kyberdian@gmail.com

Diterima: 29 Oktober 2019 Disetujui: 25 November 2019 Dipublikasikan: 2 Maret 2020

Abstract

Islamic values become part of rural communities' life in Bandung Barat Regency, the adoption of Islamic values is not only able to reflect a good personality but also represents role models as ideal leader figures for the community, so that in the political constellation of village head elections the candidates for village heads will use the values of Islam as their political identity. Based on this understanding, this article is intended to describe how the village head candidates construct the Islamic values as a political identity in the constellation of village head elections. This research is a qualitative study with a descriptive approach, data taken through observation and interviews, the process of data analysis is done through data triangulation. The results revealed that the village head candidates constructed the Islamic values as their political identity in 3 (three) ways, namely: First, constructing through family background and self-identity, such as coming from devout Muslim families, children of Islamic leaders or living as Islamic leaders. Secondly, constructing through personal symbols such as using Islamic clothing and communicating with the use of Islamic content. Third, constructing through activities directly related to Islam such as involvement in the Qur'an recitation, Islamic celebrations or other socio-religious activities. These three ways are believed by the village head candidates to benefit in constructing the Islamic values as a political identity which is expected to not only provide a positive image in the community but will also increase their level of electability in village head elections.

Keywords: *Islamic Values, Political Identity, Village Heads.*

Abstrak

Nilai-nilai Islam menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat perdesaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat, adopsi nilai-nilai Islam tidak hanya mampu mencerminkan kepribadian yang baik tetapi juga akan merepresentasikan sosok panutan dan pemimpin ideal bagi masyarakat sehingga dalam konstelasi politik pemilihan kepala desa para calon kepala desa akan senantiasa menggunakan nilai-nilai Islam sebagai identitas politiknya. Atas dasar pemahaman tersebut artikel ini ditujukan untuk menggambarkan bagaimana para calon kepala desa mengkonstruksikan politik identitas melalui nilai-nilai Islam dalam konstelasi pemilihan kepala desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data diambil melalui observasi dan wawancara, proses analisis data dilakukan melalui triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para calon kepala desa mengkonstruksikan politik identitas melalui 3 (tiga) cara, yaitu: Pertama, mengkonstruksikan melalui latar belakang keturunan atau keluarga, seperti berasal dari kalangan keluarga pesantren, anak dari tokoh Islam atau berkedudukan

sebagai tokoh Islam. Kedua, mengkonstruksikan melalui simbol-simbol pribadi seperti berpakaian secara islami dan berkomunikasi dengan muatan Islam. Ketiga, mengkonstruksikan melalui kegiatan sosial-keagamaan seperti keterlibatan dalam pengajian, syukuran atau kegiatan serupa lainnya. Ketiga cara tersebut diyakini oleh para calon kepala desa memberikan manfaat kepada pembentukan identitas politik sebagai calon pemimpin religius yang tidak hanya memberikan citra positif di tengah-tengah masyarakat tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan elektabilitas dalam pemilihan kepala desa.

Kata Kunci: Kepala Desa, Nilai Islam, Politik Identitas.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan praktek berdemokrasi secara langsung yang dilaksanakan di dalam struktur pemerintahan terbawah yaitu desa. Dilihat dalam konteks sejarah Pilkades sudah dilaksanakan sejak lama, bahkan beberapa referensi menyatakan pemberian kewenangan hak untuk memilih pemimpin bagi masyarakat desa ini diakui oleh pemerintahan Hindia-Belanda sebagai bagian dari hak asli yang melekat dari desa. Berbagai hak asli desa termasuk didalamnya penentuan kepala desa yang merupakan kewenangan desa tetap dipertahankan sampai dengan saat ini¹, pilkades sudah menjadi bagian dari aktivitas berdemokrasi di tingkat desa². Meskipun demikian Pilkades mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Pilkades yang dahulu banyak dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dalam konteks saat ini dilakukan melalui pemilihan langsung yang mana setiap warga masyarakat yang ada di desa memiliki hak suara sebagaimana telah diatur melalui perundang-undangan³.

Pilkades yang dilakukan melalui sistem *one man one vote* ini berimplikasi tidak hanya kepada hilangnya proses pemufakatan untuk menentukan kepala desa tetapi juga mendorong proses pemilihan kepala desa menjadi alat perebutan kekuasaan, sehingga para calon kepala desa akan menggunakan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk memenangkan konstelasi pemilihan kepala desa. Salah satu sumberdaya yang digunakan yaitu identitas politik yang dimilikinya, para calon kepala desa akan memanfaatkan politik identitas untuk menggalang suara masyarakat agar dapat dukungan dan meningkatkan elektabilitasnya.

¹ Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015); Kushandajani, 'Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa', *Jurnal Yustisia*, 4.2 (2015), 369-96; Turiman Fachrurrahman Nur, 'Sejarah Umum Pengaturan Pemerintahan Desa (Sebuah Catatan Analisis Hukum Tata Pemerintahan Desa)', *Rajawaligarudapancasila.Blogspot.Com*, 2014.

² Neneng Yani Yuningsih and Valina Singka Subekti, 'Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional Dan Modern Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013', *Jurnal Politik*, 1.2 (2016), 231-61.

³ Youla C. Sajangbati, 'Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014', *Jurnal Lex Administratum*, 3.2 (2015), 24-32; Richard Timotius, 'Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 48.2 (2018), 323-44.

Penggunaan politik identitas dalam Pilkades sejalan dengan kondisi empiris yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan kepada hasil penelitian pendahuluan⁴, setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan mengapa para calon kepala desa menggunakan politik identitas, yaitu: Pertama, adanya perkembangan masyarakat perdesaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat yang mana sudah banyak desa yang dihuni oleh heterogenitas masyarakat baik itu latar belakang keturunan, budaya, pekerjaan dan lain sebagainya⁵. Hal ini mendorong para calon kepala desa untuk mengkonstruksikan politik identitas yang mana tujuannya mencari kesamaan-kesamaan dengan mayoritas masyarakat sekaligus memetakan peta arah dukungan politik untuk memotret masyarakat yang berpotensi mendukung atau menolaknya.

Kedua, adanya persaingan antara sesama calon kepala desa sehingga harus memunculkan unsur pembeda antara calon kepala desa yang satu dengan calon kepala desa yang lainnya. Salah satunya cara yang dilakukan untuk memberikan pembedaan yaitu dengan menggunakan politik identitas agar masyarakat memiliki preferensi politik yang jelas mengenai calon kepala desa yang akan dipilihnya. Ketiga, penggunaan politik identitas tidak hanya dimaksudkan sebagai *branding* calon kepala desa di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga dijadikan sebagai bagian dari pembentukan visi misi kepala desa yang apabila terpilih nantinya akan dijadikan program pembangunan desa selama 6 (enam) tahun kedepan.

Politik identitas yang dilakukan oleh para calon kepala desa di Kabupaten Bandung Barat tersebut lebih banyak kepada menggunakan nilai-nilai Islam, berdasarkan kepada hasil penelitian pendahuluan hal ini didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu: Pertama, Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat perdesaan di Kabupaten Bandung Barat sehingga dengan mengkonstruksikan nilai-nilai Islam sebagai identitas politik akan memudahkan para calon kepala desa untuk memperoleh dukungan dari mayoritas masyarakat. Kedua, nilai-nilai Islam sudah menjadi bagian integral dalam budaya masyarakat perdesaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat bahkan masyarakat perdesaan menilai baik atau buruknya kepribadian seseorang salah satunya menggunakan ukuran nilai-nilai Islam sehingga para calon kepala desa akan menggunakan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari identitas politiknya. Ketiga, berdasarkan pengalaman pemilihan kepala desa yang dilakukan sebelumnya, masyarakat memiliki kecenderungan mendukung calon kepala desa yang mempraktekan nilai-nilai Islam atau dalam istilah masyarakat desa dikenal istilah "*milih anu pang solehna*" atau memilih calon kepala desa yang paling shaleh, sehingga pengalaman tersebut dijadikan acuan keberhasilan oleh para calon kepala desa untuk memenangkan konstelasi Pilkades.

Penjelasan tersebut di atas memunculkan pertanyaan mengenai apakah politik identitas yang dilakukan oleh para calon kepala desa di Kabupaten Bandung Barat hanya terbatas kepada mengkonstruksikan nilai-nilai Islam sebagai identitas politik, padahal identitas politik memiliki banyak ragam yang didalamnya termasuk suku, budaya,

⁴ Penelitian pendahuluan dilakukan dengan memfokuskan kepada 2 (dua) hal utama, yaitu kondisi empiris dinamika kehidupan masyarakat desa dalam menyikapi Pilkades dan aktivitas bakal calon kepala desa yang dalam hal ini indikasi kegiatan para bakal calon kepala desa dalam melakukan politik identitas.

pendidikan dan lain sebagainya. Berdasarkan kepada hasil penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, politik identitas dengan memanfaatkan suku, budaya, pendidikan dan pekerjaan menjadi kontraproduktif dikarenakan selain para calon kepala desa beranggapan bahwa isu suku, budaya, pendidikan dan pekerjaan tidak relevan untuk diangkat dalam konstelasi politik di tingkat desa juga dikhawatirkan akan memunculkan pertentangan di tengah-tengah masyarakat yang akan membagi masyarakat kedalam kelompok-kelompok berdasarkan suku, budaya, pendidikan dan pekerjaan, hal ini dinilai oleh para calon kepala desa akan merugikan pihaknya dan bisa memunculkan sikap antipati dan sikap penolakan dukungan dalam konstelasi Pilkades yang tengah dilaksanakan. Sedangkan politik identitas yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam dianggap tepat dikarenakan mayoritas penduduk pedesaan yang tengah melaksanakan Pilkades di Kabupaten Bandung Barat beragama Islam, sehingga politik identitas yang dibangun tersebut relatif tidak akan menimbulkan gejolak atau pertentangan di tengah-tengah masyarakat.

Politik identitas yang dipraktikkan oleh para calon kepala desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat tersebut menjadi unik dikarenakan lebih banyak menggunakan nilai-nilai Islam untuk mengkonstruksikan identitas politik para calon kepala desa. Atas dasar pemahaman tersebut maka memunculkan ketertarikan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai seperti apa praktek politik identitas yang dilakukan oleh para calon kepala desa dalam konstelasi Pilkades di Kabupaten Bandung Barat. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana para calon kepala desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat mengkonstruksikan politik identitasnya melalui nilai-nilai Islam dan apa manfaat yang didapat oleh para calon kepala desa dengan melakukan politik identitas tersebut?.

TINJAUAN PUSTAKA

Politik Identitas

Identitas diri pada dasarnya merupakan suatu perasaan subjektif mengenai dirinya sendiri yang didalamnya memiliki ciri, sifat atau karakter⁶. Dalam konteks sosial identitas diartikan sebagai pemaknaan keberadaan diri seseorang dalam interaksinya dengan lingkungan sosial sehingga menjadi penghubung antara individu dengan masyarakat. Dari pemahaman tersebut maka muncul konsep identitas sosial sebagai pemaknaan akan kesamaan sifat, ciri atau karakter terhadap suatu kelompok tertentu dalam masyarakat yang didasarkan atas kesamaan simbol seperti pakaian, kepemilikan, pemikiran dan lain sebagainya⁷, dengan begitu identitas sosial dimaknai sebagai aktivitas menyamakan simbol oleh satu individu dengan individu lain yang kemudian akan membentuk kelompok yang didasarkan atas kesamaan tertentu, hal ini juga dimaksudkan menjadi pembeda simbolik dengan kelompok lainnya yang pada akhirnya membentuk

⁵ Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2019* (Kabupaten Bandung Barat: Badan Pusat Statistik, 2019).

⁶ James E Marcia, 'Development and Validation of Ego Identity Status', *Journal of Personality and Social Psychology*, 3.5 (1966), 551-58; James P Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Terjemahan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

⁷ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004); M.A. Hogg and G.M. Vaughan, *Social Psychology* (London: Prentice Hall, 2002).

sifat persamaan dan perbedaan antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lainnya.

Menurut Castells⁸ (2010) terdapat tiga asal usul identitas, yaitu: Pertama, *legitimizing identity* atau disebut juga sebagai identitas sah yang dapat dicontohkan seperti adanya otoritas dan dominasi. Kedua, *resistance identity* atau disebut juga sebagai identitas perlawanan yang dapat dicontohkan dengan politik identitas. Ketiga, *project identity* atau disebut juga sebagai identitas proyek yang dapat dicontohkan dengan kajian gender seperti feminisme. Terdapat 3 (tiga) pendekatan dalam memahami bagaimana identitas dapat dibentuk, yaitu: Pertama, primordialisme yang mana identitas diperoleh secara alamiah atau keturunan semenjak seorang individu itu lahir. Kedua, konstruktivisme yang mana identitas sosial diperoleh melalui cara yang dibuat secara langsung orang seorang individu atau dibentuk secara sengaja melalui interaksi sosial seperti adanya ikatan sosial dan kultural. Ketiga, instrumentalisme yang mana identitas diperoleh melalui pembentukan oleh elit dalam konteks kekuasaan⁹.

Kajian identitas dalam konteks politik dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu identitas politik (*political identity*) dan politik identitas (*political of identity*). Identitas politik diartikan sebagai konstruksi yang akan menentukan posisi kepentingan dalam suatu komunitas atau masyarakat, sedangkan politik identitas merujuk kepada suatu mekanisme pengorganisasian identitas¹⁰. Politik identitas secara umum difokuskan kepada proses menemukan perbedaan-perbedaan yang didasarkan kepada simbol tertentu seperti kondisi fisik/ras, jenis kelamin dan lain sebagainya¹¹. Meskipun demikian prakteknya identitas politik dan politik identitas memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Politik identitas mendasarkan dirinya kepada identitas politik yang telah dimiliki baik berupa latar belakang keturunan/etnisitas maupun dari latar belakang yang secara sengaja dibentuk seperti latar belakang pendidikan, ekonomi dan kultur.

Politik identitas lahir didasarkan kepada 2 (dua) tujuan, pertama, sebagai alat untuk menentukan posisi seseorang atau politisi yang akan menjadi ciri kesamaan dengan kelompok tertentu, sehingga selain akan memunculkan sikap kepemilikan/*belonging* juga akan memunculkan sikap dukungan dari kelompok yang dimaksud. Kedua, sebagai alat yang sengaja dibuat untuk mempertegas perbedaan identitas dengan kelompok lainnya, dalam prakteknya hal ini digunakan untuk menunjukkan superioritas terhadap kelompok yang dianggap lemah atau secara kuantitas merupakan minoritas, baik itu didasarkan asal-usul suku, agama maupun pembeda lainnya, sehingga akan memunculkan terminologi minoritas dan mayoritas atau asli pribumi dan pendatang.

Tuntutan terhadap politik identitas dalam konteks perebutan kekuasaan semakin terbuka mengingat desakan akan keberpihakan kelompok mayoritas yang ada di masyarakat untuk senantiasa mendukung posisi politiknya, terlebih dalam karakteristik

⁸ Idris Hemay and Aris Munandar, 'Politik Identitas Dan Pencitraan Kandidat Gubernur Terhadap Perilaku Pemilih', *Jurnal Politik: Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 12.1 (2016), 1737-48.

⁹ Titik Widayanti, *Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2009).

¹⁰ Arie Setyaningrum, 'Memetakan Lokasi Bagi Politik Identitas Dalam Wacana Politik Poskolonial', *Mandatory*, 2.2 (2005), 13-34.

masyarakat yang heterogen dengan adopsi terhadap stratifikasi sosial yang kuat akan semakin menumbuhkan politik identitas. Hal ini sejalan dengan pendapat dari beberapa ahli seperti Morowitz¹² (1998) yang menyatakan bahwa politik identitas adalah pemberian garis secara tegas yang ditujukan untuk menentukan kelompok mana yang akan diterima atau disertakan dan kelompok mana yang akan ditolak. Dengan begitu akan memunculkan manipulasi perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya yang pada akhirnya ditujukan untuk memperoleh dukungan agar apa yang menjadi tujuan politiknya dapat tercapai.

Pemahaman tersebut di atas mengkonstruksikan bahwa politik identitas dikaitkan dengan konteks Pilkades merupakan sebuah keniscayaan sebagai implikasi dari adanya proses pemilihan kepala desa secara langsung, para calon kepala desa akan memanfaatkan politik identitas sebagai upaya untuk melakukan *branding* terhadap karakter dan sifat yang dimilikinya yang diharapkan mampu melahirkan dukungan dari masyarakat yang memiliki kesamaan karakter atau ciri-ciri tertentu dengan para calon kepala desa tersebut.

Demokrasi di Tingkat Desa

Keberadaan desa dalam konteks Indonesia sudah ada sebelum masa kemerdekaan, pada masa pemerintahan Hindia-Belanda digunakan terminologi “*Inlandsche Gemeenten*” untuk menyebut kesatuan wilayah yang memiliki hak untuk mengatur urusannya sendiri atau diterjemahkan dalam konteks saat ini sebagai desa¹³. Dilihat dari sejarah terbentuknya, keberadaan desa didasarkan kepada 4 (empat) unsur yaitu adanya aktor atau unsur masyarakat, solidaritas, organisasi adat serta basis material berupa wilayah hukum/ulayat¹⁴. Keempat unsur tersebut tumbuh dan berkembang di setiap desa dengan ragam nilai masing-masing, sehingga desa memiliki karakteristik tersendiri yang membentuk tradisi asli yang dipraktikkan sebagai bagian dari sistem sosial dan struktur masyarakat yang kemudian dikenal dengan istilah hak asli dan hak asal-usul desa yang mana akan berbeda antara satu desa dengan yang lainnya.

Perkembangan desa pasca Indonesia merdeka mengalami banyak perubahan, khususnya mengenai relasi antara desa dengan pemerintah, desa pada awal-awal kemerdekaan diposisikan sebagaimana pemerintahan Hindia-Belanda memosisikan desa dengan memberikan hak-hak aslinya, pada saat era orde Baru terjadi reduksi kedudukan desa yang mana desa ditempatkan menjadi bagian dari pemerintah daerah¹⁵, posisi desa kembali dikembalikan sebagai struktur pemerintahan terendah dengan hak-hak aslinya

¹¹ Ubed S Abdillah, *Politik Identitas : Pergulatan Tanda Tanpa Identitas* (Magelang: Yayasan Indonesiatara, 2002); Juhana Nasrudin and Ahmad Ali Nurdin, ‘Politik Idnetitas Dan Representasi Politik’, *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1.1 (2018), 34–47.

¹² Muhtar Haboddin, ‘Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal’, *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3.1 (2012), 116–34.

¹³ Nur M Alamsyah, ‘Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia’, *Jurnal Academca*, 3.2 (2011), 647–60.

¹⁴ Arief Sumeru, ‘Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa’, *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4.1 (2016), 47–56.

¹⁵ Suhardiman Syamsu, ‘Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia’, *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1.1 (2008), 77–88.

melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan adanya pemberian hak rekognisi dan hak subsidiaritas¹⁶.

Dinamika posisi desa dalam hubungannya dengan pemerintah yang terjadi dari awal kemerdekaan sampai saat ini tidak menghilangkan hak asli desa dalam menentukan proses pemilihan pemimpin atau kepala desa. Dalam proses penentuan pimpinan tertinggi di tingkat desa masih tetap menjadi kewenangan asli desa dalam artian unsur masyarakat yang ada di desa tetap diberikan kewenangan untuk memilih sendiri pimpinan yang terbaik bagi desanya. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur mengenai kewajiban menyelenggarakan kehidupan demokrasi di desa yang salah satunya memuat pengaturan pemilihan kepala desa sebagai bentuk praktis dari pelaksanaan demokrasi di tingkat desa yang diakui oleh pemerintah¹⁷, Pemilihan kepala desa dianggap sebagai media yang tepat untuk mengembangkan demokrasi di desa yang diharapkan mampu menjadi landasan bagi penguatan demokrasi di tingkat nasional. Dengan begitu konsep pembangunan nasional yang diawali di tingkat desa dapat diwujudkan dengan salah satunya membangun demokrasi di desa.

Demokratisasi desa perlu terus ada dan perlu ditingkatkan, hal ini didasarkan kepada 2 (dua) hal, yaitu: Pertama, dalam konteks desa demokratisasi diperlukan dalam upaya untuk mendefinisikan kembali hubungan antara masyarakat dengan para elit yang ada di desa. Kedua, demokratisasi desa merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak desa untuk mengatur urusannya secara mandiri¹⁸. Selain 2 (dua) hal tersebut di atas, demokratisasi desa melalui pemilihan kepala desa perlu tetap dipertahankan dengan alasan yang diantaranya adalah: Pertama, sebagai struktur pemerintahan paling bawah yang langsung berhadapan dengan masyarakat maka sudah selayaknya masyarakat diberikan kewenangan untuk memilih sosok yang tepat untuk menjadi kepala desa. Kedua, masyarakat akan memberikan dukungan kepala desa yang merupakan pilihan dari masyarakat itu sendiri, sehingga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Ketiga, legitimasi masyarakat akan jabatan kepala desa menjadi penting agar kinerja kepala desa dapat terlaksana dengan baik. Keempat, kemajuan desa tidak mungkin diwujudkan apabila tidak ada sinergis antara pemerintah desa yang dipimpin kepala desa dengan masyarakat, dengan adanya pemilihan kepala desa yang melibatkan masyarakat maka diharapkan mampu melahirkan sinergitas diantara keduanya.

Penjabaran tersebut diatas mengkonstruksikan pemahaman bahwa adanya pengakuan kewenangan yang telah diberikan kepada desa harus pula diikuti oleh kewajiban penyelenggaraan kehidupan masyarakat desa yang demokratis, sehingga mampu mendorong sinergitas antara masyarakat dan pemerintah/elit desa guna mencapai tujuan pembangunan desa sebagaimana yang diharapkan bersama, sehingga adanya unsur hak dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dengan masyarakat desa untuk secara bersama-sama memajukan desa berdasar kepada kewenangan yang telah diberikan. Pemilihan kepala desa juga merupakan pengejawantahan dari bentuk demokratisasi desa

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Indonesia, 2014).

¹⁷ Kushandajani.

¹⁸ Amanulloh.

yang perlu tetap dipertahankan selain untuk melestarikan tradisi yang sudah lama ada juga dilihat dari substansinya masih relevan dengan konteks penyelenggaraan demokrasi saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, hal ini didasarkan kepada tujuan penelitian yang ingin menggambarkan secara jelas dan rinci mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh para calon kepala desa dalam mengkonstruksikan nilai-nilai Islam sebagai identitas politik yang digunakan dalam konstelasi pemilihan kepala desa. Dengan begitu diharapkan akan melahirkan suatu gambaran yang alamiah dan utuh mengenai proses konstruksi nilai-nilai Islam sebagai bagian dari politik identitas yang tengah dilakukan, hal ini sejalan dengan pemahaman ahli¹⁹ yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi objek yang alami atau natural.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui proses wawancara yang dilakukan baik terhadap calon kepala desa maupun kepada masyarakat dan pihak lainnya yang secara langsung terlibat dalam proses pemilihan kepala desa. Sumber data sekunder diperoleh melalui kajian dari berbagai referensi yang memiliki keterkaitan langsung baik itu buku, jurnal, laman web maupun sumber referensi lainnya. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan²⁰. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bandung Barat dengan mengambil waktu penelitian dimulai sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang dilakukan mulai dari observasi sampai dengan pengambilan data penelitian. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka kajian terhadap pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 yang dilakukan di 112 desa dengan mengambil sampel penelitian di Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Ngamprah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehidupan masyarakat desa didasarkan atas keterjalinan komunal antara sesama anggota masyarakat²¹, atas dasar tersebut struktur sosial yang terjalin bersifat erat dan intim, setiap anggota masyarakat akan memiliki kecenderungan untuk mementingkan kebaikan bersama guna mewujudkan keharmonisan kehidupan bermasyarakat yang berada di lingkungan perdesaan. Pemahaman tersebut berlaku dalam pemilihan kepala desa yang mana masyarakat akan memilih kepala desa yang dianggap mampu mengayomi semua masyarakat dan memperjuangkan kepentingan bersama guna kemajuan desa yang diharapkan. Dasar pemilihan kepala desa yang didasarkan sebagai tujuan untuk kebaikan bersama inilah yang menjadikan kepala desa terpilih selain

¹⁹ Lexy J Moleong, 'Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)' (Yogyakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 2017).

²⁰ John W Creswell, *Qualitative Inquiry and Reseach Design: Choosing Among Five Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2007).

²¹ Angkasawati, 'Masyarakat Desa', *Jurnal Publiciana*, 8.1 (2015), 1–23.

mendapatkan legitimasi secara legal juga mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

Proses dalam menentukan kepala desa didasarkan kepada nilai-nilai budaya yang disepakati bersama, nilai-nilai tersebut merupakan nilai yang diyakini oleh semua anggota masyarakat sebagai sebuah kebenaran dan tuntutan yang akan membawa kebaikan bagi bersama. Dalam konteks desa-desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat maka setidaknya terdapat 2 (dua) nilai yang dijunjung oleh masyarakat yaitu nilai-nilai Islam dan nilai-nilai budaya Sunda, kedua nilai tersebut tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat secara bersamaan dan harmonis, bahkan sudah terjadi akulturasi nilai diantara keduanya yang mana nilai budaya Sunda banyak didasarkan kepada nilai Islam dan juga nilai Islam dalam lingkungan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari budaya Sunda.

Proses dinamika desa yang berlangsung hingga saat ini yang mana pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung dan setiap warga masyarakat memiliki hak suara dalam proses pemilihan kepala desa tidak mengubah dasar penentuan kepala desa yang dianggap tepat berdasarkan kepada nilai-nilai Islam dan nilai-nilai budaya Sunda yang sudah lama dipraktekan di desa-desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Nilai-nilai Islam tentang kepemimpinan seperti *sidiq* atau jujur/benar, amanah atau dapat dipercaya, *tabligh* atau komunikatif, *fathanah* atau cerdas²² menjadi dasar masyarakat untuk menentukan pilihannya, begitu juga dengan nilai budaya Sunda tentang kepemimpinan menjadi pula dasar yang dipertimbangkan oleh masyarakat, nilai tersebut antara lain yaitu *nyantri* atau memiliki keyakinan dan mempraktekan nilai-nilai Islam, *nyakola* atau memiliki pendidikan yang baik, *nyunda* atau memegang dan mempraktekan nilai-nilai budaya Sunda²³. Kedua nilai tersebut dalam prakteknya tidak mengalami dikotomi, meskipun demikian apabila dikaji secara konseptual dapat dibedakan dan dijelaskan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1.
Nilai Islam dan Nilai Sunda dalam Perspektif Masyarakat Desa

Nilai	Dimensi	Wujud Konkrit
Islam	Sidiq	<ul style="list-style-type: none">• Ucapan atau pendapatnya dapat dipercaya oleh masyarakat• Tidak pernah membohongi masyarakat• Tidak pernah terlibat dengan kasus penipuan• Tidak pernah mencuri• Tidak pernah terlibat kasus korupsi
	Amanah	<ul style="list-style-type: none">• Menjunjung komitmen yang telah dibuat• Bekerja sebagaimana tugas yang diberikan• Bersikap profesional atas kepercayaan yang diberikan
	Tabligh	<ul style="list-style-type: none">• Memiliki tutur bahasa yang sopan dan santun• Menyampaikan sesuai dengan pemahaman dan pengetahuannya

²² Sarbini Sarbini, 'Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam', *Jurnal TAPIS*, 9.2 (2003), 17–29; Sakdiah, 'Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah', *Jurnal Al-Bayan*, 22.33 (2016), 29–49.

²³ Priadi Surya, 'Kepemimpinan Perempuan Bernilai Kesundaan Di Bidang Pendidikan', *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6.2 (2010).

		<ul style="list-style-type: none">• Apa yang disampaikannya sesuai dengan kenyataan• Ramah terhadap semua warga masyarakat• Menjalin kekeluargaan dengan warga masyarakat
	Fathanah	<ul style="list-style-type: none">• Memiliki pemahaman yang baik tentang Islam• Memiliki pengetahuan dan wawasan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat• Memiliki jenjang pendidikan yang baik
Sunda	Nyantri	<ul style="list-style-type: none">• Mengamalkan nilai-nilai Islam• Tidak pernah berperilaku secara terbuka melanggar nilai-nilai Islam• Memberikan contoh perilaku yang baik bagi masyarakat sesuai nilai-nilai Islam
	Nyakola	<ul style="list-style-type: none">• Memiliki jenjang pendidikan yang baik• Memahami sejarah dan perkembangan desa• Memiliki kepekaan dan daya nalar untuk menyerap berbagai permasalahan yang ada di masyarakat• Memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas
	Nyunda	<ul style="list-style-type: none">• Mengetahui dan memahami nilai budaya Sunda• Mengamalkan dan mengembangkan nilai-nilai budaya Sunda• Melestarikan nilai-nilai budaya Sunda

Sumber: Analisis Peneliti, 2019.

Didasarkan kepada pemahaman dalam tabel 1 tersebut di atas maka baik nilai Islam maupun nilai budaya Sunda memiliki peran penting sebagai standar pengukuran kepala desa yang dianggap tepat atau ideal bagi masyarakat. Atas dasar penggunaan kedua nilai tersebut dalam menentukan kepala desa maka secara empiris dapat dikatakan bahwa seluruh kepala desa yang dipilih melalui proses Pilkades merupakan anggota warga masyarakat dari suku Sunda dan beragama Islam, hal ini menjadi bukti bahwa preferensi masyarakat terhadap figur ideal kepala desa yang didasarkan kepada standar nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Buaya Sunda diaktualisasikan dalam bentuk dukungan politik kepada calon kepala desa yang memiliki identitas politik sebagai warga masyarakat dari suku Sunda yang beragama Islam.

Kenyataan tersebut di atas mendorong calon kepala desa di Kabupaten Bandung Barat untuk memanfaatkan politik identitas melalui nilai-nilai Islam dan nilai-nilai budaya Sunda. Apabila dikomparasikan maka hampir seluruh calon kepala desa menggunakan nilai Islam, sedangkan yang menggunakan nilai budaya Sunda sebagai identitas politik yang utama relatif lebih sedikit. Berdasarkan kepada hasil penelitian hal tersebut didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu: Pertama, Islam merupakan agama mayoritas sehingga memberikan peluang dukungan yang lebih besar pula. Kedua, di beberapa desa sudah dihuni oleh masyarakat dari beragam suku selain dari suku Sunda, sehingga menggunakan identitas kesukuan memiliki resiko untuk tidak dipilih oleh warga masyarakat yang berlatar belakang dari suku non-Sunda. Meskipun demikian, di desa-desa yang memiliki latar belakang Islam dan dihuni oleh homogenitas masyarakat berlatar belakang suku Sunda, identitas politik yang dibangun oleh sebagian calon kepala desa senantiasa menggunakan kedua nilai tersebut meskipun secara empiris nilai Islam

yang jauh lebih ditonjolkan oleh para calon kepala desa dibanding dengan identitas politik lainnya.

Penggunaan nilai-nilai Islam dalam pilkades di kabupaten Bandung Barat secara empiris tidak ditujukan untuk menjatuhkan calon kepala desa lainnya, tetapi para calon kepala desa lebih fokus kepada pembangunan citra mereka sebagai sosok calon kepala desa yang religius yang tidak hanya mampu menjadi contoh bagi masyarakat lainnya tetapi juga mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam permasalahan yang berkaitan dengan keislaman apabila nantinya terpilih menjadi kepala desa.

Proses membangun politik identitas dengan menggunakan nilai-nilai Islam yang dilakukan oleh para calon kepala desa di Kabupaten Bandung Barat dilakukan melalui berbagai cara, setidaknya terdapat tiga cara yang dilakukan oleh para calon kepala desa untuk mengkonstruksikan politik identitasnya, yaitu: Pertama, konstruksi politik identitas melalui latar belakang keturunan/keluarga. Kedua, konstruksi politik identitas melalui simbol-simbol pribadi. Ketiga, konstruksi politik identitas melalui aktivitas keagamaan. Konstruksi politik identitas melalui tiga cara tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai Islam itu sendiri yang tidak hanya diartikan sebagai ketaatan secara pribadi dalam melaksanakan ajaran Islam. Dalam konteks Islam dikenal istilah *Habluminallah* dan *Habluminannas* atau konsep ketaatan yang meliputi ketaatan kepada Tuhan yang ditunjukkan dengan cara menjalankan ritual ibadah secara pribadi dan ketaatan kepada Tuhan yang ditujukan berupa tindakan sosial atau kepada sesama makhluk. Nilai Islam tersebut diterjemahkan oleh para calon kepala desa sebagai keimanan secara individual dan keimanan secara sosial yang dapat dijelaskan dalam tabel 2 berikut ini:

Tabel 2.
Konstruksi Nilai Islam dan Nilai Budaya Sunda

Nilai Islam	Nilai Sosial	Wujud Perbuatan
Habluminallah	Keimanan Individu	Politik identitas melalui simbol-simbol pribadi
Habluminannas	Keimanan Komunal	Politik identitas melalui latar belakang keturunan/keluarga
	Keimanan Sosial	Politik identitas melalui aktivitas sosial-keagamaan

Sumber: Analisis Peneliti, 2019.

Berdasarkan kepada tabel di atas dapat dikatakan bahwa keimanan individu dalam konteks pemilihan kepala desa ditujukan dengan membangun simbol-simbol pribadi seperti melalui cara berpakaian atau cara berbicara dalam menyikapi suatu permasalahan dengan mengambil perspektif Islam. Keimanan secara komunal dalam konteks pemilihan kepala desa ditunjukkan dengan membangun citra keluarga atau kerabat yang berada di lingkungannya sebagai orang-orang yang menjunjung tinggi dan mempraktekan nilai-nilai Islam, sedangkan keimanan sosial ditunjukkan dengan cara ikut aktif terlibat dalam kegiatan sosial keagamaan. Adapun uraian mengenai tiga cara yang dilakukan oleh kepala desa dalam mengkonstruksikan nilai-nilai Islam melalui dalam konteks pemilihan kepala desa secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konstruksi Politik Identitas melalui Latar Belakang Keturunan/Keluarga

Politik identitas yang paling mudah untuk digunakan yaitu menggunakan latar belakang keturunan baik itu ras maupun kekerabatan, hal ini dikarenakan ras dan kekerabatan merupakan pembeda seseorang yang didapat semenjak lahir²⁴. Hal ini pula berlaku dalam konteks pemambangan politik identitas melalui nilai-nilai agama yang dalam konteks Pilkades di Kabupaten Bandung Barat menggunakan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan kepada hasil penelitian yang dilakukan bahwa para calon kepala desa di Kabupaten Bandung Barat menggunakan 2 (dua) cara membangun politik identitas keluarga (ras maupun kekerabatan) yaitu melalui latar belakang keturunan dan melalui latar belakang keluarga inti yang mana latar belakang keturunan memiliki cakupan yang lebih luas mulai dari latar belakang orang tua, mertua sampai dengan kakek nenek, sedangkan latar belakang keluarga inti hanya mencakup suami atau istri dan anak-anak. Politik identitas melalui keluarga inti juga dalam prakteknya memasukan unsur pribadi calon kepala desa yang bersangkutan seperti berkedudukan sebagai pemuka agama atau tokoh masyarakat yang memiliki basis agama. Konstruksi politik identitas melalui latar belakang keturunan dan melalui latar belakang keluarga inti dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 3 berikut ini:

Tabel 3.

Konstruksi Politik Identitas melalui Keturunan dan melalui Latar Belakang Keluarga Inti

Latar Belakang	Sumber Identitas	Cara Membangun Identitas
Keturunan	Orang Tua/ Mertua	<ul style="list-style-type: none">• Orang tua merupakan tokoh agama yang dihormati• Orang tua merupakan pendiri atau pengurus lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren• Orang tua telah memberikan kontribusi dalam perkembangan Islam di desa dan/atau juga luar desa
	Kakek/ Nenek	<ul style="list-style-type: none">• Kakek/ Nenek merupakan tokoh agama yang dihormati• Kakek/ Nenek merupakan pendiri atau pengurus lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren• Kakek/ Nenek telah memberikan kontribusi dalam perkembangan Islam di desa dan/atau juga luar desa
Keluarga Inti	Isri/Suami	<ul style="list-style-type: none">• Memiliki istri atau suami sebagai pendiri atau pengurus lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren• Memiliki istri atau suami sebagai pemuka agama• Memiliki istri atau suami sebagai pendiri/pengurus kegiatan Islam seperti majelis taklim
	Anak-Anak	<ul style="list-style-type: none">• Memiliki anak-anak yang bersekolah di lembaga pendidikan Islam• Memiliki anak yang mempunyai prestasi dalam kegiatan Islam• Memiliki anak yang berkedudukan sebagai tokoh agama• Memiliki anak yang berprofesi ssebagai pengurus lembaga pendidikan Islam seperti guru agama

²⁴ Mustaghfiroh Rahayu, 'Keragaman Di Indonesia Dan Politik Pengakuan (Suatu Tinjauan Kritis)', *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4.2 (2017), 1-18; Haboddin.

Pribadi	• Berkedudukan sebagai tokoh agama
Bersangkutan	• Berkedudukan sebagai pendiri atau pengurus lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren
	• Berkedudukan sebagai pendiri atau pengurus kegiatan Islam seperti majelis taklim

Sumber: Analisis Peneliti, 2019.

Berdasarkan kepada tabel 3 di atas dapat dikatakan bahwa calon kepala desa menggunakan berbagai simbol yang dimilikinya baik yang berhubungan langsung seperti posisinya sebagai tokoh agama maupun yang tidak berhubungan secara langsung seperti melalui keluarga dari garis kakek atau nenek. Membangun politik identitas melalui latar belakang keturunan/keluarga dilakukan oleh para calon kepala desa didasarkan kepada 3 (tiga) alasan, yaitu: Pertama, ketokohan seseorang di lingkungan perdesaan khususnya yang mempunyai kedudukan sebagai tokoh Islam yang terdandang dibangun dalam kurun waktu yang lama dan masyarakat sudah memiliki persepsi yang baik akan ketokohnya, sehingga dengan mengaitkan figur calon kepala desa dengan figur tokoh Islam yang merupakan bagian dari keluarganya akan memberikan persepsi bahwa calon tersebut dibesarkan dalam lingkungan yang baik pula.

Kedua, masyarakat memiliki persepsi bahwa calon kepala desa yang memiliki hubungan dengan keluarga dari kalangan tokoh Islam akan senantiasa menjaga citra dan nama baik keluarga yang sudah terbangun baik di masyarakat, sehingga apabila terpilih menjadi kepala desa akan menjalankan tugasnya dengan baik. Pandangan masyarakat seperti ini yang dimanfaatkan oleh para calon kepala desa untuk membangun politik identitas melalui latar belakang keturunan atau keluarga.

Ketiga, pengalaman yang baik terhadap ketokohan seseorang dalam kehidupan masyarakat desa menciptakan suatu pemahaman bahwa banyak hak yang berkaitan dengan ketokohan tersebut akan memiliki kebaikan pula, oleh sebab itu adanya calon kepala desa yang memiliki hubungan dengan tokoh Islam diartikan dengan akan membawa kebaikan pula sama seperti pendahulunya/ tokoh Islam. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh calon kepala desa yang dalam prakteknya sering mengaitkan kebaikan yang telah dilakukan keluarganya pada saat dahulu dengan kebaikan yang sama yang akan dilakukan kembali apabila calon tersebut terpilih menjadi kepala desa.

Keluarga inti yang terdiri dari suami atau istri dan anak merupakan salah satu cara untuk membangun politik Islam. Kondisi keluarga yang harmonis dan didasarkan kepada nilai-nilai Islam merupakan interpretasi dari keluarga yang menjadi panutan bagi keluarga lainnya di lingkungan perdesaan, sehingga masyarakat memiliki kecenderungan untuk mendukung calon kepala desa yang memiliki kehidupan harmonis dan baik tersebut. Didasarkan kepada hal tersebut maka para calon kepala desa akan senantiasa menampilkan keluarga yang harmonis yang didasarkan kepada nilai-nilai Islam guna menciptakan persepsi yang baik di tengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya diharapkan mampu menciptakan dukungan kepada pencalonan sebagai kepala desa.

Pemahaman tersebut di atas menguatkan pemahaman bahwa calon kepala desa yang memiliki hubungan dengan tokoh Islam baik yang ada di desanya maupun juga

yang berada di luar desanya namun memiliki pengaruh yang besar maka diposisikan dalam kondisi yang menguntungkan dan menjadi modal politik yang berkontribusi dalam membangun identitas politik melalui nilai-nilai Islam. Di sisi lain bagi calon yang tidak memiliki kekerabatan atau hubungan dengan tokoh Islam harus mampu membangun identitas politiknya melalui cara yang lain yang salah satu caranya dengan membangun identitas politik melalui penggunaan simbol-simbol Islam secara pribadi guna meyakinkan masyarakat bahwa pribadinya merupakan figur calon kepala desa yang senantiasa mempraktekan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi dan sosialnya.

Konstruksi Politik Identitas melalui Simbol-Simbol Pribadi

Politik identitas melalui nilai-nilai Islam tidak akan terlepas dari penggunaan simbol-simbol agama. Simbol sebagaimana diartikan sebagai penggunaan media untuk merepresentasikan suatu objek²⁵ maka dalam konteks pilkades para calon kepala desa akan menginterpretasikan cara berpakaian, cara berperilaku dan cara berpendapat yang memuat simbol Islam sebagai konstruksi politik identitas. Dalam prakteknya hal yang paling mudah dilakukan oleh para calon kepala desa di Kabupaten Bandung Barat yaitu dengan menggunakan simbol melalui gaya berbusana atau cara berpakaian, bagi calon kepala desa yang berjenis kelamin laki-laki akan senantiasa menggunakan baju koko dan peci sebagai representasi simbol Islam dalam hal busana atau berpakaian, sedangkan bagi calon kepala desa perempuan akan menggunakan kerudung sebagai simbol wanita muslimah sebagaimana ajaran Islam yang mengharuskan perempuan menggunakan kerudung untuk menutup aurat.

Penggunaan pakaian secara islami dalam konteks kehidupan masyarakat desa di Kabupaten Bandung Barat merupakan sesuatu yang dianggap wajar, banyak kaum laki-laki yang kesehariannya menggunakan baju koko dan peci baik digunakan dalam acara formal seperti dalam acara musyawarah desa maupun dalam acara-acara tidak formal, begitupula dengan warga masyarakat yang berjenis kelamin perempuan sudah banyak yang menggunakan kerudung bahkan sudah menjadi hal yang umum dalam kehidupan masyarakat desa. Dikaitkan dengan konteks Pilkades maka penggunaan simbol-simbol Islam melalui cara berpakaian dianggap tidak memiliki signifikansi dikarenakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam berpakaian di lingkungan masyarakat desa yang ada di kabupaten Bandung Barat.

Cara berpakaian islami yang ditunjukkan masyarakat desa diakui oleh para calon kepala desa sebagai sesuatu yang umum di lingkungan perdesaan sehingga tidak akan memberikan citra khusus atau spesial bagi masyarakat desa, meskipun demikian para calon kepala desa tersebut berpendapat akan merasa nyaman dan merasa dapat diterima lebih baik oleh masyarakat dengan baik dalam kegiatan formal maupun dalam kegiatan informal apabila menggunakan pakaian secara islami. Dengan begitu akan memunculkan sikap persamaan dengan masyarakat pada umumnya khususnya dalam cara berpakaian.

²⁵ Nila Sastrawati, 'Simbolisme Dalam Pencitraan Partai Politik', *Jurnal Al-Daulah*, 4.1 (2015), 168–77.

Politik identitas yang digunakan melalui nilai-nilai Islam oleh para calon kepala desa lainnya yaitu berbicara menggunakan muatan Islam. Politik Identitas ini digunakan oleh para calon kepala desa melalui forum-forum resmi seperti dalam kegiatan Musrembang desa dengan cara menyampaikan pendapat dan gagasan pribadinya dengan membawa muatan Islam baik secara verbal seperti penggunaan sapaan atau pembukaan penyampaian pendapat maupun secara substansial seperti membawa permasalahan yang berkaitan dengan Islam untuk dibahas dan dimasukkan dalam berbagai program pembangunan desa. Tujuan dari penggunaan isu Islam oleh calon kepala desa sebagai upaya meyakinkan masyarakat bahwa pribadinya mendukung terhadap penyelenggaraan kegiatan islami yang selama ini ada di lingkungan perdesaan.

Gaya komunikasi dengan muatan nilai-nilai Islam apabila dikaji secara konseptual akan mampu menciptakan dampak yang baik bagi para calon kepala desa, posisi sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan serta adanya media atau simbol yang ingin disampaikannya yaitu nilai-nilai Islam²⁶, maka akan memberi dampak berupa munculnya citra calon pemimpin yang religius atau islami di tengah-tengah masyarakat yang hadir. Oleh sebab itu menjadi penting bagi para calon kepala desa untuk senantiasa memahami gaya komunikasi yang efektif dalam proses pilkades.

Politik identitas yang digunakan melalui nilai-nilai Islam oleh para calon kepala desa selanjutnya adalah dengan menunjukkan perilaku islami dalam artian menjalankan kehidupan sehari-hari baik dalam konteks kehidupan keluarga maupun dalam konteks kehidupan sosial bermasyarakat dengan tidak melanggar apa yang dilarang oleh ajaran Islam seperti mabuk, mencuri, menipu dan tindakan serupa lainnya. Para calon kepala desa berkeyakinan bahwa perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam mencerminkan sebagai warga masyarakat yang tidak baik sehingga akan mendapatkan stigma yang buruk di tengah-tengah masyarakat.

Pemahaman yang serupa juga diutarakan oleh masyarakat yang mana mereka tidak akan memilih calon kepala desa yang memiliki perilaku tidak baik dan melanggar nilai-nilai Islam. Warga masyarakat memiliki kekhawatiran apabila orang dengan perilaku tidak baik tersebut menjadi kepala desa tidak hanya akan menjadi preseden yang buruk tetapi juga dikhawatirkan tidak akan mampu menjalankan tugasnya sebagai kepala desa dengan baik sehingga akan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tengah dilaksanakan di desa.

Adanya kriteria pemimpin yang memiliki perilaku baik yang ditunjukkan dari simbol-simbol pribadi yang digunakan oleh para calon kepala desa merupakan standar penilaian kepemimpinan yang berlaku baik dalam level desa maupun dalam level daerah dan nasional, hal ini dibuktikan oleh berbagai penelitian seperti dari Najib²⁷, Solikin, dkk²⁸ yang mengungkapkan bahwa kepribadian yang baik yang diinterpretasikan melalui

²⁶ Mochammad Yunus Gerry Fitriadi, 'Gaya Kepemimpinan Tokoh Informal Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Desa Mandiri Pangan' (Institut Pertanian Bogor, 2017); Ahmad Tamrin Sikumbang, 'Teori Komunikasi (Pendekatan, Kerangka Analisis Dan Perspektif)', *Jurnal Analytica Islamica*, 6.1 (2017), 77–84.

²⁷ Ainun Najib, 'Konstruksi Pemimpin Ideal Untuk Indonesia', *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 3.1 (2013), 141–61.

²⁸ Asep Solikin, H.M. Fachturahman, and Supardi, 'Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa', *Jurnal Anterior*, 16.2 (2017), 90–103.

simbol-simbol pribadi menjadi salah satu dasar penilaian masyarakat dalam memilih pemimpin secara langsung.

Pemahaman akan tuntutan perilaku yang baik dan islami yang harus ditunjukkan oleh para calon kepala desa selain mengharuskan para calon kepala desa tersebut untuk memiliki jejak rekam perilaku yang baik dan islami juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa perilaku yang dimiliki selama ini merupakan perilaku yang sudah baik dan layak menjadi kepala desa, sehingga diharapkan dengan perilakunya yang sudah baik akan bisa mengemban tugas yang diberikan serta memperjuangkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Uraian mengenai politik identitas melalui penggunaan simbol-simbol pribadi dalam pilkades di kabupaten Bandung Barat pada hakekatnya didasarkan kepada 2 (dua) alasan utama, yaitu: Pertama, adanya latar belakang calon kepala desa yang mana sebelum mencalonkan diri sebagai kepala desa kurang mencerminkan nilai-nilai Islam sehingga dalam konteks Pilkades perlu meyakinkan masyarakat bahwa dirinya merupakan bagian dari warga masyarakat yang senantiasa mengamalkan nilai-nilai Islam dan akan mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Islam apabila terpilih menjadi kepala desa. Kedua, calon kepala desa yang bersangkutan tidak memiliki latar belakang keluarga atau keturunan dari tokoh agama, sehingga belum memiliki citra Islam yang kuat di tengah-tengah masyarakat. Kondisi tersebut mengharuskan calon kepala desa untuk membangun politik identitas melalui nilai-nilai Islam agar menciptakan citra figur calon kepala desa yang islami.

Konstruksi Politik Identitas melalui Aktivitas Sosial-Keagamaan

Terdapat perbedaan antara pemilihan kepala daerah atau pilkada (baik untuk tingkat provinsi maupun untuk tingkat kabupaten/kota) dengan pilkades. Pilkada meliputi wilayah yang luas dengan jumlah masyarakat yang banyak pula, sedangkan pilkades meliputi cakupan wilayah terbatas dengan jumlah masyarakat yang relatif sedikit. Dalam konteks pilkada dimungkinkan calon kepala daerah untuk tidak dikenal oleh sebagian masyarakat di suatu wilayah tertentu, oleh sebab itu kewajiban calon kepala daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dianggap kurang mengenal calon kepala daerah sekaligus memperkenalkan figur pribadi guna membangun citra politik yang baik di tengah-tengah masyarakat.

Proses membangun identitas calon kepala daerah tidak luput dari pemanfaatan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari politik identitas yang dibangunnya. Calon kepala daerah banyak menghadiri acara-acara yang berkaitan langsung dengan Islam seperti menghadiri hari-hari besar Islam, kegiatan pengajian, kegiatan syukuran warga masyarakat atau sengaja mengunjungi basis masyarakat Islam seperti berkunjung ke pondok pesantren. Tujuan dari kegiatan tersebut selain untuk memperkenalkan figur calon kepala daerah kepada masyarakat juga sebagai bentuk *branding* guna meningkatkan dukungan masyarakat.

Politik identitas yang dilakukan oleh calon kepala desa secara konseptual (khususnya dikaji dalam konsep sosio-perdesaan) tidak perlu dilakukan oleh calon kepala

desa, hal tersebut sebagaimana dijelaskan di atas bahwa desa merupakan kesatuan wilayah yang terbatas yang mana setiap warga masyarakat akan saling mengenal satu sama lain termasuk didalamnya sudah mengenal figur calon kepala desa yang merupakan warga asli yang bertempat tinggal di desa tersebut. Namun secara empiris yang ada di Kabupaten Bandung barat, politik identitas yang dilakukan melalui nilai-nilai Islam juga dilakukan oleh calon kepala desa.

Berdasarkan kepada hasil penelitian adanya politik identitas dengan menggunakan nilai-nilai Islam yang ditunjukkan dengan melakukan aktivitas sosial-keagamaan oleh kepala desa didasarkan kepada hal-hal berikut ini: Pertama, para calon kepala desa berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara interaksi sosial sebagai bagian dari hubungan kehidupan masyarakat perdesaan dengan interaksi sosial yang dilakukan dalam konteks pemilihan kepala desa. Dalam konteks pemilihan kepala desa adanya muatan persuasif yang ditujukan selain untuk meyakinkan bahwa dirinya layak dan pantas untuk menjadi kepala desa sehingga perlu didukung oleh warga masyarakat. Kedua, para calon kepala desa berpendapat bahwa dengan terlibat dalam kegiatan sosial-keagamaan sebagai bukti akan keberpihakan mereka terhadap berbagai kegiatan sosial keagamaan yang sudah lama dilaksanakan di desa dan akan terus didukung dan dilanjutkan apabila terpilih sebagai kepala desa. Ketiga, para calon kepala desa berpendapat bahwa dengan menghadiri kegiatan sosial-keagamaan akan menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya akan dijadikan masukan apabila terpilih sebagai kepala desa.

Keterlibatan para calon kepala desa dalam kegiatan sosial-keagamaan yang dilaksanakan di lingkungan perdesaan dilakukan secara spontan tanpa dilakukan perencanaan sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan antara aktivitas yang dilakukan oleh calon kepala daerah dengan yang dilakukan oleh calon kepala desa. Para calon kepala desa melakukan kegiatan sosial-keagamaan didasarkan kepada konsultasi dengan tim sukses yang sudah mengukur secara rasional dampak dan manfaat dari keterlibatan calon kepala daerah dalam kegiatan sosial-keagamaan, sedangkan calon kepala desa tidak memiliki dasar konseptual atas keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial-keagamaan. Dengan demikian sekalipun pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung dengan memanfaatkan politik identitas, namun cara yang digunakan masih bersifat spontan dikarenakan keterbatasan sumberdaya yang ada untuk menyusun pola perencanaan politik identitas yang terencana dan terukur.

Idealnya proses keterlibatan calon kepala desa dalam berbagai kegiatan sosial-keagamaan didasarkan kepada konsep dan perhitungan dampak yang jelas, seperti harus didasarkan kepada analisis khayalak atau dalam konteks ini masyarakat yang ada di desa, adanya kebutuhan, sasaran dan tujuan yang pasti, adanya perencanaan strategi yang meliputi komunikator, saluran, pesan serta penerima, besarnya dana, sumber dana dan waktu kampanye²⁹. Dengan menggunakan konsep seperti itu maka keterlibatan para

²⁹ Muh Zulkifli Tahir, Hafied Canggara, and A. Alimuddin Unde, 'Penggunaan Media Komunikasi Untuk Politik Pencitraan Kandidat Buapti Dan Wakil Bupati Dalam Pemilukada Takalar 2012', *Jurnal Komunikasi Kareba*, 2.2 (2013), 165-74.

calon kepala desa dalam kegiatan sosial-keagamaan akan memiliki dampak dan manfaat yang bisa diukur guna mencapai keberhasilan yang diinginkan.

Kegiatan sosial-keagamaan yang dilakukan oleh para calon kepala desa secara empiris di Kabupaten Bandung Barat dilakukan dalam 2 (dua) jenis kegiatan, yaitu: Pertama, kegiatan yang diselenggarakan oleh salah satu warga masyarakat seperti pengajian, syukuran atau menjadi saksi pernikahan, kegiatan tersebut akan memiliki pengaruh yang besar lagi apabila warga masyarakat tersebut merupakan tokoh masyarakat sehingga kehadiran calon kepala desa dalam acara tersebut memiliki harapan selain untuk memperkenalkan diri sebagai calon kepala desa sebagai media untuk menggalang dukungan. Kedua, kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang ada di desa seperti dari Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK), majelis taklim dan lain sebagainya, jenis kegiatan yang diselenggarakan relatif memiliki kesamaan seperti pengajian ataupun peringatan hari besar keagamaan seperti maulid nabi Muhammad SAW.

Politik identitas yang dibangun oleh para calon kepala desa melalui kegiatan sosial-keagamaan disikapi berbeda oleh masyarakat. Setidaknya terdapat 3 (tiga) sikap yang berbeda yang ditunjukkan masyarakat, yaitu: Pertama, masyarakat yang menaruh simpati kepada calon kepala desa yang melakukan dan memiliki ketertarikan untuk mendukung calon kepala desa tersebut dalam pilkades yang akan dilaksanakan, kelompok masyarakat ini merasa memiliki kesamaan preferensi politik dengan calon kepala desa yang tengah terlibat dalam kegiatan sosial-keagamaan. Kedua, masyarakat yang menaruh simpati kepada calon kepala desa yang tengah terlibat dalam kegiatan sosial-keagamaan namun mereka menyatakan tidak akan memilih calon kepala desa tersebut. Ketiga, masyarakat yang tidak memiliki simpati terhadap calon kepala desa yang terlibat dalam kegiatan sosial-keagamaan. Adapun penjelasannya dapat diuraikan dalam tabel 4 berikut ini:

Tabel 4.
Sikap Masyarakat terhadap Keterlibatan Calon Kepala Desa
dalam Kegiatan Sosial-Keagamaan

Sikap Masyarakat	Posisi Keberpihakan	Alasan
Bersimpati	Mendukung dan Memilih	<ul style="list-style-type: none">• Masih memiliki ikatan kekeluargaan• Sudah mengenal baik dengan calon kepala desa• Menaruh rasa percaya• Memiliki kesamaan tujuan• Memiliki harapan yang besar terhadap kepemimpinannya
	Mendukung pencalonan tetapi tidak memilih	<ul style="list-style-type: none">• Sudah memiliki pilihan calon kepala desa lain, namun memiliki ketertarikan dengan janji politik yang disampaikan• Calon kepala desa belum bisa meyakinkan sepenuhnya• Mempertimbangkan calon kepala desa lainnya• Beranggapan pilkades sebagai sarana demokrasi bagi setiap warga masyarakat

Tidak Bersimpati	Tidak mendukung dan tiak memilih	<ul style="list-style-type: none">• Tidak percaya akan janji yang diutarakan• Sudah memiliki pilihan calon kepala desa lain• Mengenal calon kepala desa jauh sebelum pencalonan dan memiliki rekam jejak yang kurang baik.
------------------	----------------------------------	--

Sumber: Analisis Peneliti, 2019.

Berdasarkan kepada tabel 4 di atas maka adanya sikap yang berbeda terhadap keterlibatan calon kepala desa dalam kegiatan sosial-keagamaan ditentukan oleh rekam jejak dan cara yang digunakan untuk meyakinkan masyarakat, oleh sebab itu para calon kepala desa harus benar-benar memiliki rekam jejak yang baik dan menggunakan cara-cara yang baik pula dalam membangun politik identitas melalui kegiatan sosial-keagamaan, hal ini dikarenakan sebagian masyarakat sudah mengetahui figur yang bersangkutan sebelum mencalonkan sebagai kepala desa.

Manfaat Politik Identitas bagi Calon Kepala Desa

Politik identitas melalui nilai-nilai Islam yang dibangun oleh para calon kepala desa di Kabupaten Bandung Barat tidak terlepas dari motif atau tujuan agar mayoritas warga masyarakat yang beragama Islam memberikan dukungan dan memilih calon kepala desa tersebut dalam Pilkades. Politik identitas yang dibangun tersebut dikarenakan tidak didasarkan kepada analisis dan perencanaan terhadap sasaran serta pengukuran dampaknya secara terencana dan sistematis maka menjadi sulit untuk diukur bagaimana dampaknya atau manfaatnya terhadap elektabilitas calon kepala desa tersebut. Meskipun demikian berikut adalah beberapa manfaat yang didapat oleh para calon kepala desa dari politik identitas yang dibangunnya: Pertama, politik identitas merupakan proses membangun citra sebagai pemimpin yang islami atau religius di mata masyarakat. Hal ini diutarakan oleh calon kepala desa yang berpendapat bahwa selain harus memiliki penampilan yang sesuai dengan ajaran Islam, adanya keterlibatan calon kepala desa dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan Islam dimaksudkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa apabila dirinya terpilih menjadi kepala desa maka kegiatan tersebut akan terus dipertahankan bahkan apabila memungkinkan akan ditingkatkan secara intensif agar menciptakan kondisi masyarakat perdesaan yang islami.

Kedua, politik identitas memberikan manfaat kepada para calon kepala desa berupa gambaran masyarakat yang mendukung atau belum mendukung terhadap pencalonan dirinya. Menurut calon kepala desa mengetahui siapa yang menjadi pendukungnya merupakan modal dalam pilkades sehingga dengan dukungan tersebut akan secara bersama-sama mengajak masyarakat lainnya untuk turut serta memberikan dukungan dengan harapan banyaknya dukungan yang diberikan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan elektabilitas dalam Pilkades. Mengetahui masyarakat yang tidak mendukung bagi para calon kepala desa juga menjadi penting mengingat banyaknya alasan yang mendasari sikap masyarakat untuk tidak memilih satu calon kepala desa tertentu, sehingga dengan begitu akan memberikan masukan bagi calon kepala desa untuk memperbaiki apa yang menjadi kelemahannya atau faktor yang menjadi dasar masyarakat tidak mendukung pencalonan dirinya sebagai kepala desa.

Ketiga, politik identitas memberikan manfaat kepada para calon kepala desa berupa gambaran permasalahan yang terjadi di masyarakat. Apakah permasalahan yang selama ini ada mampu diselesaikan melalui pendekatan-pendekatan agama atau memerlukan pendekatan lainnya, seperti permasalahan mengenai kenakalan remaja apakah melalui peningkatan kegiatan yang berbasis nilai-nilai Islam yang dilakukan di desanya akan mampu memberikan perubahan yang signifikan. Hal ini menjadi penting untuk gambaran apabila calon kepala desa tersebut terpilih menjadi kepala desa, dengan begitu berbagai permasalahan yang ada akan dijadikan sebagai bahan masukan guna menyusun perencanaan pembangunan baik untuk jangka menengah maupun jangka pendek.

Uraian mengenai penjelasan manfaat penggunaan politik identitas yang dilakukan oleh para calon kepala desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat merupakan pendapat pribadi dari calon kepala desa. Lebih lanjut apakah politik identitas yang dilakukan tersebut benar-benar berkontribusi signifikan terhadap elektabilitas calon kepala desa perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengingat bahwa para calon kepala desa yang ada sama-sama beragama Islam dan menampilkan figur pemimpin yang islami sehingga konstelasi yang terjadi diantara para calon kepala desa merupakan persaingan untuk menunjukkan kelebihan dari pribadi masing-masing dalam mengadopsi nilai-nilai Islam dan bukan dalam konteks melakukan politik perbedaan antara kepala desa yang menggunakan nilai-nilai Islam dengan yang tidak menggunakan nilai-nilai Islam sebagai identitas politiknya.

KESIMPULAN

Persaingan yang terjadi dalam pilkades di Kabupaten Bandung Barat secara langsung telah memunculkan politik identitas, meskipun demikian karakter masyarakat yang menjunjung tinggi persamaan dan rasa kekeluargaan serta menghindari konflik secara terbuka berimplikasi kepada politik identitas tidak dipraktikkan dengan tujuan memunculkan perbedaan atau pertentangan karakter/sifat antara satu calon kepala desa dengan calon kepala desa lainnya, tetapi lebih dipraktikkan sebagai bentuk menunjukkan simbol derajat ketaatan dan keimanan yang lebih tinggi terhadap nilai-nilai Islam yang dilakukan oleh para calon kepala desa. Hal ini mengandung artian bahwa para calon kepala desa berlomba-lomba untuk melakukan *branding* bahwa dirinya lebih “shaleh” dibandingkan dengan calon kepala desa lainnya.

Praktek tersebut di atas berimplikasi kepada konstruksi identitas politik yang dilakukan oleh para calon kepala desa lebih bersifat persuasif untuk meyakinkan kepada masyarakat akan adanya kebaikan yang ada pada diri calon kepala desa tersebut dan bukan bersifat konfrontatif dengan mencari perbedaan atau pertentangan dengan calon kepala desa lainnya yang dimungkinkan akan menjatuhkan harga diri calon kepala desa lainnya dan berujung kepada penciptaan situasi kehidupan masyarakat perdesaan yang tidak kondusif.

Konstruksi politik identitas yang bersifat persuasif tersebut di atas dilakukan oleh para calon kepala desa melalui 3 (tiga) cara, yaitu: Pertama, mengkonstruksikan melalui latar belakang keturunan dan identitas diri, seperti berasal dari kalangan keluarga

pesantren atau memiliki keluarga yang selama ini "taat" terhadap nilai-nilai Islam, merupakan anak dari tokoh Islam yang berjasa dan berpengaruh baik di lingkungan desanya maupun di luar lingkungan desanya, atau juga memiliki kedudukan sebagai tokoh Islam. Kedua, mengkonstruksikan melalui simbol-simbol pribadi seperti berpakaian secara islami yang ditunjukkan dengan menggunakan baju koko dan peci bagi calon kepala desa laki-laki dan berkerudung bagi calon kepala desa perempuan, serta melakukan komunikasi kepada masyarakat dengan penggunaan muatan Islam. Ketiga, mengkonstruksikan melalui aktivitas yang berkaitan langsung dengan Islam seperti menghadiri acara pengajian, syukuran, menjadi wali nikah atau kegiatan sosial-keagamaan lainnya. Ketiga cara yang dilakukan oleh para calon kepala desa tersebut diyakini oleh para calon kepala desa memberikan manfaat kepada pembentukan identitas politik sebagai calon pemimpin religius yang tidak hanya memberikan citra positif di masyarakat tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan elektabilitas dalam pemilihan kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Ubed S, *Politik Identitas: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas* (Magelang: Yayasan Indonesiatara, 2002)
- Alamsyah, Nur M, 'Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia', *Jurnal Academica*, 3 (2011), 647–60
- Amanulloh, Naeni, *Demokratisasi Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)
- Angkasawati, 'Masyarakat Desa', *Jurnal Publiciana*, 8 (2015), 1–23
- Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2019* (Kabupaten Bandung Barat: Badan Pusat Statistik, 2019)
- Chaplin, James P, *Kamus Lengkap Psikologi*, Terjemahan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
- Creswell, John W, *Qualitative Inquiry and Reseach Design: Choosing Among Five Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2007)
- Dariyo, Agoes, *Psikologi Perkembangan Remaja* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004)
- Fitriadi, Mochammad Yunus Gerry, 'Gaya Kepemimpinan Tokoh Informal Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Desa Mandiri Pangan' (Institut Pertanian Bogor, 2017)
- Haboddin, Muhtar, 'Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal', *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3 (2012), 116–34
- Hemay, Idris, and Aris Munandar, 'Politik Identitas Dan Pencitraan Kandidat Gubernur Terhadap Perilaku Pemilih', *Jurnal Politik: Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 12 (2016), 1737–48
- Hogg, M.A., and G.M. Vaughan, *Social Psychology* (London: Prentince Hall, 2002)
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Indonesia, 2014)
- Kushandajani, 'Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa', *Jurnal Yustisia*, 4 (2015), 369–96
- Marcia, James E, 'Development and Validation of Ego Identity Status', *Journal of Personality and Social Psychology*, 3 (1966), 551–58
- Moleong, Lexy J, 'Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)' (Yogyakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 2017)
- Najib, Ainun, 'Konstruksi Pemimpin Ideal Untuk Indonesia', *In Right: Jurnal Agama*

- Dan Hak Azazi Manusia*, 3 (2013), 141–61
- Nasrudin, Juhana, and Ahmad Ali Nurdin, 'Politik Identitas Dan Representasi Politik', *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1 (2018), 34–47
- Nur, Turiman Fachrurrahman, 'Sejarah Umum Pengaturan Pemerintahan Desa (Sebuah Catatan Analisis Hukum Tata Pemerintahan Desa)', *Rajawaligarudapancasila.Blogspot.Com*, 2014
- Rahayu, Mustaghfiroh, 'Keragaman Di Indonesia Dan Politik Pengakuan (Suatu Tinjauan Kritis)', *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4 (2017), 1–18
- Sajangbati, Youla C., 'Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014', *Jurnal Lex Administratum*, 3 (2015), 24–32
- Sakdiah, 'Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah', *Jurnal Al-Bayan*, 22 (2016), 29–49
- Sarbini, Sarbini, 'Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam', *Jurnal TAPIS*, 9 (2003), 17–29
- Sastrawati, Nila, 'Simbolisme Dalam Pencitraan Partai Politik', *Jurnal Al-Daulah*, 4 (2015), 168–77
- Setyaningrum, Arie, 'Memetakan Lokasi Bagi Politik Identitas Dalam Wacana Politik Poskolonial', *Mandatory*, 2 (2005), 13–34
- Sikumbang, Ahmad Tamrin, 'Teori Komunikasi (Pendekatan, Kerangka Analisis Dan Perspektif)', *Jurnal Analytica Islamica*, 6 (2017), 77–84
- Solikin, Asep, H.M. Fachrurrahman, and Supardi, 'Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa', *Jurnal Anterior*, 16 (2017), 90–103
- Sumeru, Arief, 'Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa', *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4 (2016), 47–56
- Surya, Priadi, 'Kepemimpinan Perempuan Bernilai Kesundaan Di Bidang Pendidikan', *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6 (2010)
- Syamsu, Suhardiman, 'Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia', *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1 (2008), 77–88
- Tahir, Muh Zulkifli, Hafied Canggara, and A. Alimuddin Unde, 'Penggunaan Media Komunikasi Untuk Politik Pencitraan Kandidat Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Takalar 2012', *Jurnal Komunikasi Kareba*, 2 (2013), 165–74
- Timotius, Richard, 'Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 48 (2018), 323–44
- Widayanti, Titik, *Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2009)
- Yuningsih, Neneng Yani, and Valina Singka Subekti, 'Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional Dan Modern Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013', *Jurnal Politik*, 1 (2016), 231–61